

PEDOMAN PENYUSUNAN
KERANGKA ACUAN KERJA (K.A.K)
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH PADA KEGIATAN PENILAIAN
DAN EVALUASI KINERJA APARATUR
TAHUN 2023

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH PADA KEGIATAN PENILAIAN
DAN EVALUASI KINERJA APARATUR
TAHUN 2023

I. LATAR BELAKANG

a) Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Perbendaharaan Negara;
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

b) Gambaran Umum

Dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, melalui Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai pada Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai BKD Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pemberian penghargaan dan perlindungan bagi PNS, yang meliputi:

1. Pembekalan bagi PNS yang akan memasuki Purna Tugas, dengan merubah cara pikir PNS aktif layaknya pensiunan dengan menata lagi keuangan, mengelola modal seperti

- pengalaman, tabungan, jejaring dan waktu menjadi satu aktivitas positif yang akan bermanfaat bagi kesehatan fisik dan mental dan keuangan serta menjadikan pensiunan yang mandiri.
2. Usul Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BKD Provinsi Jawa Tengah mengusulkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya PNS dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah ke Sekretariat Militer Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri.
 3. Pemberian penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya di samping sebagai penghargaan atas jasa-jasanya juga merupakan kebanggaan untuk lebih meningkatkan semangat kerja, motivasi kerja, meningkatkan kinerja dan disiplin. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pembangunan manajemen kepegawaian guna mewujudkan aparatur yang bersih, loyal dan berintegritas tinggi.
 4. Penanganan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Uji Kesehatan. Pemberian perlindungan bagi PNS dalam melaksanakan tugas keseharian sebagai PNS. Selain itu dilaksanakan uji kesehatan bagi PNS yang mengalami gangguan kesehatan serta sebagai salah satu persyaratan untuk perpanjangan cuti sakit.
 5. Bintek Kaderisasi Kepemimpinan PNS berbasis Gender. Dalam rangka membangun karakter PNS untuk dapat mengembangkan kapasitas dirinya dan mengaktualisasikan perannya sebagai mitra dalam pembangunan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a) Maksud

1. Sebagai bentuk penegakkan disiplin bagi PNS dan memberikan penghargaan dan perlindungan PNS dalam melaksanakan tugasnya.
2. Sebagai bentuk *reward* kepada PNS yang telah bekerja sesuai ketentuan perundang-undangan.

b) Tujuan

1. Menumbuhkan motivasi Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kinerja dan disiplin, agar dapat menjadi teladan bagi masyarakat dan lingkungan kerjanya;
2. Menghargai jasa setiap PNS atas kesetiaannya pada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin;
3. Mengenalkan berbagai aktivitas kewirausahaan sesuai bidang peminatan yang akan dirintis ke depan, mulai dari permodalan, demonstrasi dan praktik di lokasi minat kewirausahaan;
4. Menjamin dan memelihara kesehatan Aparatur Sipil Negara secara jasmani dan rohani di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
5. Memberikan perlindungan dan rasa aman bagi PNS dalam bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
6. Meningkatkan mutu pelayanan, kesehatan, dan keselamatan pegawai guna meningkatkan kinerja pegawai Badan Kepegawaian Daerah dalam mewujudkan pelayanan prima bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
7. Meningkatkan kompetensi kepemimpinan PNS agar dapat mencapai kemajuan yang lebih optimal dari potensi yang dimilikinya.

III. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah :

1. Pembekalan bagi PNS yang akan memasuki Purna Tugas
Kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam dengan pemberian materi berupa materi pengetahuan secara teori dan praktik serta kunjungan lapangan, dengan jumlah peserta 40 orang dalam 2 kali kegiatan/Angkatan.
2. Usul Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya
Penyampaian dokumen kelengkapan PNS yang diusulkan untuk mendapatkan penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

3. Pemberian penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya
Penyematan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dengan pemberian piagam dan SK Presiden tersebut melalui rangkaian penyematan pada acara kenegaraan, yaitu upacara.
4. Penanganan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Uji Kesehatan
Penyampaian usul dokumen kelengkapan PNS yang mengalami kecelakaan kerja atau mengalami gangguan kesehatan untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan dan kewenangannya.
5. Bintek Kaderisasi Kepemimpinan PNS berbasis Gender.
Pelaksanaan kegiatan Bintek Kaderisasi PNS berbasis gender di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah peserta 50 (lima Puluh) orang yang telah dinyatakan lulus *talent scouting*.

IV. SASARAN :

1. Jumlah yang mendapatkan pembekalan PNS yang memasuki masa purna tugas 80 orang.
2. Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mendapatkan penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya sejumlah 100 orang.
3. Jumlah usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota se-Jawa Tengah sejumlah 2000 dokumen.
4. Jumlah penanganan usulan Jaminan Kecelakaan Kerja sejumlah 2 dokumen.
5. Bintek Kaderisasi Kepemimpinan PNS berbasis Gender sejumlah 50 orang.

V. LOKASI KEGIATAN :

Kegiatan dilaksanakan di dalam daerah lingkup Provinsi Jawa Tengah dan di Jakarta pada Kementerian Dalam Negeri dan Sekretariat Militer Presiden.

VI. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan	Bulan :											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Pembekalan bagi PNS yang akan memasuki Purna Tugas												

Usul Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya												
Pemberian penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya												
Penanganan Jaminan Kecelakaan dan Uji Kesehatan												
Bintek Kaderisasi Kepemimpinan PNS berbasis Gender												

VII. KELUARAN

1. Terlaksananya pembekalan PNS yang memasuki masa purna tugas sejumlah 100 orang.
2. Terlaksananya PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mendapatkan penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya sejumlah 100 orang.
3. Terlaksananya usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota se-Jawa Tengah sejumlah 2000 dokumen.
4. Terlaksananya penanganan usulan Jaminan Kecelakaan Kerja sejumlah 2 dokumen.
5. Terlaksananya Bintek Kaderisasi Kepemimpinan PNS berbasis Gender sejumlah 50 orang.

VIII. ANGGARAN

Biaya kegiatan dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sebesar Rp 488.300.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

IX. PENUTUP

a) Kesimpulan

Dengan terlaksananya kegiatan penegakkan disiplin, pemberian penghargaan dan perlindungan PNS diharapkan akan dapat memberi kebanggaan kepada setiap Pegawai Negeri Sipil,

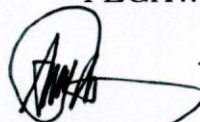
menumbuhkan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja pegawai serta memberikan perlindungan bekerja.

b) Saran

1. Perlu dibentuknya sistem aplikasi pengusulan secara *online* khususnya pada setiap SKPD Provinsi Jawa Tengah sebagai langkah persiapan dilaksanakannya pengusulan berbasis aplikasi yang direncanakan oleh Sekretariat Militer Presiden.
2. Menerapkan penggunaan sistem aplikasi dalam mengajukan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PNS yang mengalami kecelakaan kerja.
3. Perlu kajian lebih lanjut tentang fungsi kesejahteraan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bagi PNS yang mengalami gangguan kesehatan, terkait pemberian bantuan pemeriksaan kesehatan/*medical check up* bagi PNS yang sakit/ yang memiliki risiko pekerjaan yang tinggi serta pemberian bantuan biaya pengujian kesehatan bagi PNS yang direkomendasikan melakukan uji kesehatan.

Semarang, 15 Januari 2022

KEPALA BIDANG
PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN
PEGAWAI



KABUL SUTRIYONO, S.H., M.H.

Pembina

NIP 19690513 198903 1 005